



ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PP.17 TAHUN 2010 DI INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Yorhans S. Lopis¹, Hendrik A.E. Lao^{2*}

^{1,2}Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

*Email korespondensi : hendriklaos33@gmail.com

Diterima Mei 2024; Disetujui Juni 2024; Dipublikasi 31 Juli 2024

Abstract: Analysis of the management and administration of education based on PP. 17 of 2010, that the management and administration of education is an inseparable part of the 8 national education standards as a benchmark for the quality of education implementation. The method used in this research is a qualitative method with data collection techniques by interviewing 3 education managers or administrators. The results found are as follows: 1) evaluate the management and implementation of education, there needs to be an increase in the competency of education personnel and education staff in each education unit so that education quality is achieved. 2) implementation of education management and administration requires good collaboration between education units and stakeholders such as parents, non-educational institutions or education practitioners to improve the quality of education management and administration. 3) the relevance of education management that has been carried out based on Law no. 17 of 2010 that the relevance of existing education is running well, but there needs to be equal distribution of educational facilities and infrastructure and funding for education with a touch of educational technology as a means of learning. The conclusion from the analysis is that the evaluation, implementation and relevance of education management and administration are effective and efficient but need to be transparent in management.

Keywords : Management, Evaluation, Implementation and Relevance.

Abstrak: Analisis pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan PP. 17 tahun 2010, bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan merupakan bagian yang tidak terlepas 8 standar nasional Pendidikan sebagai tolak ukur kualitas penyelenggaraan Pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan 3 orang pengelola atau penyelenggara Pendidikan. Adapun hasil yang ditemukan sebagai berikut: 1) evaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan perlu ada peningkatan bagai kompetensi personil Pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada dalam setiap satuan Pendidikan sehingga tercapai mutu Pendidikan. 2) implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan perlu adanya kolaborasi yang baik antara satuan Pendidikan dengan stakeholder seperti orang tua, lembaga non Pendidikan atau praktisi Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan. 3) relevansi pengelolaan Pendidikan yang telah dilakukan berdasarkan UU No. 17 tahun 2010 bahwa relevansi Pendidikan yang ada berjalan dengan baik namun perlu ada pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan pendanaan pembiayaan Pendidikan dengan sentuhan teknologi Pendidikan sebagai sarana dalam pembelajaran. Kesimpulan dari analisis bahwa evaluasi, implementasi dan relevansi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sudah efektif dan efisien namun perlu transparan dalam pengelolaan.

Kata kunci : Pengelolaan, Evaluasi, Implementasi dan Relevansi

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan erat kaitannya dengan keseluruhan proses mengarahkan dan memadukan segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material, untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada dasarnya yang menjadi perhatian administrasi adalah tujuan, orang, sumber daya dan waktu. Buku ini membahas secara rinci tentang pengertian, dasar-dasar, tujuan dan ruang lingkup administrasi pendidikan; Komponen, peraturan, mekanisme dan tata kerja lembaga pendidikan; Fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai penyelenggara pendidikan; Administrasi guru; Undang-undang dasar kepegawaian dan kode etik staf pengajar; administrasi dan supervisi Pendidikan (Daryanto, 2013). Salah satu unsur penting dalam suatu organisasi adalah manajemen. Dengan adanya manajemen maka seluruh program dan kegiatan suatu organisasi dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga berlaku pada organisasi pendidikan. Setiap bagian dalam suatu organisasi pendidikan hendaknya dikelola dengan manajemen yang baik.

Dengan pengelolaan yang baik maka seluruh perangkat pendidikan akan dapat bersinergi dengan baik sehingga kegiatan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen merupakan unsur penting dalam pelaksanaan setiap program organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, seluruh unsur penyelenggaraan pendidikan akan berjalan dengan baik apabila dikelola dengan menggunakan konsep dan prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan secara benar dan baik akan berdampak

pada efisiensi pelaksanaan program, meningkatkan mutu dan produktivitas pendidikan yang pada akhirnya menjadikan lembaga tersebut berkualitas

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen dalam melaksanakan program pendidikan bukanlah suatu tujuan, melainkan suatu alat atau cara untuk mencapai mutu dan meningkatkan kinerja yang diharapkan. Di Indonesia, upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki pola pengelolaan. Kebijakan desentralisasi merupakan suatu bentuk perbaikan dan reparaigmatisasi manajemen pendidikan yang didalamnya terdapat penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Aspek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Provinsi) antara lain adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia yang potensial (Didin et al., 2013). Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam manajemen Pendidikan. Sebab sebuah lembaga Pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari kemampuan mengelola Pendidikan dengan baik untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional. Pendidikan diakui sebagai hak fundamental warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap orang mempunyai hak untuk menerima pelayanan pendidikan dan jaminan akan pendidikan dari negaranya dan oleh karena itu negara pun diwajibkan memenuhi kebutuhan akan pendidikan bagi warga negaranya, (Simanjuntak et al., 2014).

Pengelolaan dan penyelenggaraan tersebut

perlu dilakukan evaluasi, menurut (Mulyadi, 2010). Evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menemukan nilai sesuatu. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan implementasinya saja, namun juga berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan dan lingkungan kebijakan publik, (Nugroho, 2012). Sehingga evaluasi tersebut merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai dalam fase tertentu dengan tujuan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan evaluasi hingga pada tahap evaluasi implementasi (On Going Evaluation) dengan menggunakan indikator evaluasi Badjuri dan Yuwono: input, proses, dan output. Menurut (Hasyim F, 2010) bahwa dalam pelaksanaan anggaran harus ada pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Pemisahan tugas dan wewenang ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan.

Pentingnya pemisahan tugas dan wewenang dalam pengelolaan pembiayaan dikemukakan oleh (Mestry, 2006) dalam pembahasan hasil penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui persepsi orang tua dan pendidik terhadap pertanggungjawaban manajemen keuangan sekolah di beberapa sekolah dasar di Gauteng, Afrika Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan sekolah merupakan tanggungjawab Badan Pengelola sekolah, dalam pelaksanaannya tugas ini didelegasikan kepada beberapa orang yang memiliki kemampuan

dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dan untuk menghindari atau meminimalisasi munculnya penipuan, pencurian dan kolusi. Dari hasil penelitian tersebut secara implementasi pengelola dan penyelenggaraan Pendidikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan PP. no. 17 tahun 2010 tentang pengelola atau penyelenggaraan Pendidikan. Sebagaimana menurut.. bahwa Objektif manajemen pendidikan adalah untuk mencapai sesuatu yang telah ditetapkan tujuan pendidikan baik secara institusional maupun nasional. Manajemen adalah merupakan komponen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan utuh. Tanpa manajemen yang baik mustahil tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien, (Anwar, 2017). Standar Nasional Pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan tujuan mencapai efisiensi dan efektivitas pendidikan, (Mutia, 2019). (Harris & Fleming, 2017) menyatakan bahwa manajemen sekolah memerlukan kolaborasi, jaringan kerja sama dan peran berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan pola kepemimpinan yang terdistribusi dengan baik (Rahayu, 2015). Dibutuhkan sinergi semua pihak untuk melakukan perubahan (Jannah, 2020). Kepala sekolah dan stafnya tetap berkomitmen untuk melakukan perubahan, inovasi dan perbaikan. Kepala sekolah harus mampu merancang struktur organisasi, dan membangun budaya organisasi yang terbuka, tumbuh dan berani mengambil risiko (Rahayuningsih, 2022).

Pengelolaan pendidikan yang sinergi antara

pimpinan dengan yang dipimpin, tertata dengan baik, mengedepankan asas iman dan akhlak, keadilan dan persamaan, musyawarah, pembagian kerja dan tugas, berpegang pada fungsi manajemen, pergaulan dan keiklasan. Salah satu tolok ukur keberhasilan proses pendidikan adalah seperangkat nilai, gagasan, atau cita-cita sebagai tujuan yang diwujudkan dan diungkapkan dalam pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, yang merupakan ciri khas sehingga pola pelatihan yang harus diberikan agar dapat tercapai. siswa mampu mencapai tujuan pendidikan tersebut (Hamid, 2019). Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum mencakup dua jenis, yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pendidikan nilai dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi individu berkarakter. Upaya ini mengandung nilai-nilai spiritual yang berfungsi sebagai benteng bagi anak didik dari berbagai jalan kemaksiatan dan kesesatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan dan pembelajaran harus dihubungkan dengan upaya perubahan yang mengarahkan peserta didik menjadi pribadi yang konsisten dalam berbuat baik dan saling memperbaiki. Hasil yang diharapkan dari pendidikan nilai ini adalah peserta didik dapat menghayati makna nilai-nilai tersebut, sehingga mereka senantiasa menabur benih-benih kebaikan dalam segala aktivitas hidupnya. Dengan demikian, nilai-nilai kebaikan yang telah tertanam dalam diri peserta didik akan tumbuh dan menyebar dalam komunitas yang lebih besar, menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis, (Nirwani & Abubakar, 2019). Pendidikan bagi masyarakat adalah upaya yang

penting dalam membangun keluarga harmonis, terutama pendidikan yang ditujukan kepada perempuan. Perempuan memegang peranan krusial sebagai pendidik dalam pendidikan informal di rumah. Peran ini sangat signifikan karena melalui pendidikan informal, terjadi proses transfer pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari orang tua kepada anak-anak mereka, (Akbar & Mustangin, 2022). Agen restorasi pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis di sekolah-sekolah. Melalui pendidikan dapat dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik antaragama, membangun pemahaman moderat, serta mempromosikan toleransi dan kerukunan antaragama, (Kristianus & Nehemia, 2023). Hidup antar umat beragama yang harmonis sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, saling tolong-menolong, dan tidak bermusuhan. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menjadikan agama sebagai pemersatu bangsa Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan negara, (Nazmudin, 2018). Bagi bangsa Indonesia, pendidikan toleransi merupakan aspek krusial yang tidak hanya mencakup teori dan pengetahuan, tetapi juga harus mampu menghasilkan masyarakat yang memiliki kearifan lokal (local wisdom) dan berpandangan inklusif. Pendidikan toleransi harus memampukan individu untuk menempatkan diri mereka sejajar dengan orang lain, menghargai keragaman, dan bekerja sama dalam membangun bangsa sehingga perlu adanya pengelolaan pendidikan yang baik, (Sodik, 2020).

Manajemen pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen mempunyai arti yang sama dengan administrasi (Lao, 2021). Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai penerapan aturan-aturan administratif dalam bidang Pendidikan. Manajemen merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota organisasi dimana keempat proses tersebut mempunyai fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dualisme manajemen pendidikan juga terjadi dalam pembinaan dilaksanakan oleh departemen yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Departemen Agama (Depag). Perkembangan Madrasah di di bawah naungan Kementerian Agama menghadap sekolah negeri dibawahnya Pedoman Kementerian Pendidikan Nasional seringkali menimbulkan kecemburuan dari tingkat pertama (SD dan MI) hingga perguruan tinggi. Mulai dari alokasi dana, perhatian, pembinaan manajerial, bantuan buku dan media pembelajaran, serta penempatan guru, dan seringnya pemberian beasiswa pendidikan lanjutan tidak sama dengan yang diterima di sekolah negeri (Departemen Pendidikan Nasional) dengan madrasah (Kemenag), (Imam, 2021). Menurut (Griffin, 2015), manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ada beberapa fungsi manajemen itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan. Perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.

b. Pengorganisasian. Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau sejumlah tujuan. Dalam suatu organisasi memerlukan seorang pemimpin, tugas pemimpin meliputi beberapa kegiatan yaitu mengambil keputusan, memberikan komunikasi agar terjadi saling pengertian antara atasan dan bawahan, memberikan semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar melaksanakan apa yang diperintahkan.

c. Mengarahkan. Pengarahan merupakan suatu fungsi manajemen yang berkaitan dengan upaya memberikan bimbingan, saran, perintah atau petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar terarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada awalnya.

d. Pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan upaya pemantauan kinerja agar kinerja terarah dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja terarah dan disampaikan sebagaimana mestinya.

e. Perkembangan. Pembangunan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan manajemen, dengan adanya pengembangan manajemen maka akan berjalan sesuai dan melampaui target yang ingin dicapai. Pendidikan yang bermutu dapat terwujud melalui kolaborasi yang baik antara semua komponen pendidikan, karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan pemahaman dan komitmen yang sama antara guru, orang tua, masyarakat, serta para pemangku kepentingan

(stakeholder) dalam pendidikan. Pendekatan ini harus disederhanakan dalam bentuk pola berpikir sistematis (Systematic Thinking). Dukungan sosial (Social Support) dari lingkungan sekitar merupakan salah satu bentuk kepedulian yang penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang kompleks, (Nurhayati & Imron Rosadi, 2022)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pendidikan yang baik sebagai proses yang mengarahkan seluruh komponen Pendidikan maka perlu adanya sinergi yang berkualitas dari semua elemen pengelolaan Pendidikan demi tercapainya kualitas pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataannya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada umumnya masih belum dilakukan secara maksimal begitu pula dengan persoalan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang ada di Institut Agama Kristen Negeri Kupang masih terjadi kesenjangan seperti kurangnya tenaga sumber daya seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan juga masih ada kekurangan sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi dan ditingkatkan sehingga tercapai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Melihat fenomena yang ada maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode

fenomenologi (Sugiyono, 2009), karena berdasarkan sebuah fenomena yang terjadi dalam proses pembelajaran. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2023 serta tempat pelaksanaan penelitian yaitu di kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Subjek penelitian yaitu 3 orang dosen IAKN Kupang, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan teknik triangulasi data..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara yang dilakukan terhadap 3 orang informan, maka dapat jelaskan hasil wawancara berdasarkan 3 indikator Evaluasi, implementasi dan relevansi seperti di bawah ini:

1. Evaluasi Penyelenggara Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama tentang evaluasi penyelenggara Pendidikan masih banyak yang harus dibenahi karena ada berbagai kendala yang dihadapi oleh pengelola Pendidikan baik pemerintah maupun penyelenggara Pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat seperti kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan juga fasilitas yang tidak merata di semua satuan Pendidikan. Hal ini senada dengan jawaban informan kedua bahwa evaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan kualitas Pendidikan. Sedangkan hasil wawancara dengan informan ketiga mengungkapkan bahwa evaluasi

penyelenggara atau pengelola Pendidikan berdasarkan PP. no. 17 tahun 2010 dilakukan dengan cara perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap satuan Pendidikan yang ada di daerah karena masih banyak yang belum melakukan standar proses dan pengelolaan sesuai tuntutan undang-undang sistem Pendidikan nasional.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan UU No. 17 tahun 2010 sudah dilakukan secara baik dan berkelanjutan namun perlu ada transparansi dan pemerataan dalam hal pengelolaan Pendidikan dari sabang sampai Merauke sehingga tidak ada yang lagi istilah keterbelakangan Pendidikan di Indonesia karena semuanya sudah terjangkau oleh Pendidikan yang bermutu.

2. Implementasi Pengelolaan Pendidikan berdasarkan PP. No. 17 Tahun 2010

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tiga orang informan yang dijelaskan di bawah ini. Hasil wawancara dengan informan pertama mengatakan bahwa implementasi pengelolaan Pendidikan masih perlu dibenahi sebab masih ada lembaga Pendidikan tertentu yang hanya diperuntuk untuk menerima kaum borjuis yang memiliki modal yang lebih baik dari kaum marginal. Sedangkan hasil wawancara dengan informan kedua mengatakan bahwa implementasi pengelolaan Pendidikan yang tertulis dalam PP. No. 17 tahun 2010 sudah berjalan dengan baik namun perlu ada perubahan berkaitan penataan atau pemerataan biaya Pendidikan. Sedangkan hasil wawancara dengan informan ketiga terkait dengan implementasi pengelolaan

Pendidikan yang ada menjelaskan bahwa sistem pengelolaan sudah bagus namun dari sistem proses yang belum dilaksanakan secara maksimal diakibatkan karena kompetensi sumber daya manusia yang belum merata.

Dari hasil wawancara di atas tentang implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan UU. No. 10 Tahun 2010 bahwa sistem implementasi penerapan dan pengelolaan Pendidikan sudah dijalankan secara efektif dan efisien namun masih dari aspek proses belum dilaksanakan secara maksimal karena terkendala pemerataan sumber daya seperti tenaga guru, sarana dan prasarana.

3. Relevansi Pengelolaan Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang informan tentang relevansi pengelolaan Pendidikan yang telah dilaksanakan, maka berikut hasil wawancaranya. Hasil wawancara dengan informan pertama menjelaskan bahwa relevansi pengelolaan Pendidikan harus lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat dan kurikulum perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Serta prinsip pemerataan dan keadilan tentang dana harus lebih diperhatikan lagi. Sedangkan hasil wawancara dengan informan kedua mengatakan bahwa relevansi pengelolaan pendidikan yang telah dilaksanakan berdasarkan pengamatan informan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti pemerataan pendanaan biaya Pendidikan serta pelaksanaan pengawasan dalam sistem Pendidikan nasional yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu sehingga dapat bersaing dengan negara maju. Hal ini senada dengan jawaban informan ketiga bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan

menyarankan agar Pemerintah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem pendidikan nasional bisa dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Dari hasil wawancara di atas tentang relevansi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan UU No. 17 tahun 2010 disimpulkan relevansi dengan kebutuhan dan sistem Pendidikan yang berlaku telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan regululasi yang terdapat dalam undang-undang sistem Pendidikan nasional. Namun dari beberapa aspek seperti pemerataan pendanaan biaya Pendidikan dan sarana prasarana belum merata sehingga perlu ditingkatkan agar tercapai mutu Pendidikan nasional yang diharapkan.

Pembahasan Hasil Analisis

Setelah dilakukan kajian analisis hasil di atas, maka pada bagian ini dibahas tentang evaluasi. Implementasi dan relevansi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan UU. No. 17 tahun 2010. Adapun pembahasan sebagai berikut:

1. Evaluasi

Evaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan UU No. 17 tahun 2010 sudah dilakukan secara baik dan berkelanjutan namun perlu ada transparansi dan pemerataan dalam hal pengelolaan Pendidikan dari sabang sampai Merauke sehingga tidak ada yang lagi istilah keterbelakangan Pendidikan di Indonesia karena semuanya sudah terjangkau oleh Pendidikan yang bermutu.

Hasil analisis ini didukung dengan penelitian (Sabar Budi, 2012) Urutan prioritas Dalam

meningkatkan kompetensi lulusan dilakukan dengan cara peningkatan standar kualitas personel, konten, sarana dan prasarana, manajemen, penilaian, proses dan pembiayaan meskipun terdapat berbagai kendala dialami oleh sekolah. Penelitian ini di dukung dengan hasil penelitian (Utami et al., 2019) pendidik dan tenaga kependidikan perlu meningkatkan kompetensi yang dimiliki serta kepedulian dari pengawas atau pembina lembaga dan instansi terkait dalam mengawasi dan membina lembaga untuk peningkatan mutu pendidikan.

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan perlu ada peningkatan bagai kompetensi personil Pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada dalam setiap satuan Pendidikan sehingga tercapai mutu Pendidikan.

2. Implementasi

Implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan UU. No. 10 Tahun 2010 bahwa sistem implemenetasi penerapan dan pengelolaan Pendidikan sudah dijalankan secara efektif dan efisien namun masih dari aspek proses belum dilaksanakan secara maksimal karena terkendala pemerataan sumber daya seperti tenaga guru, sarana dan prasarana. Hasil analisis ini didukung dengan penelitian (Putri, 2020) sudah sesuai dengan Standar Pengelolaan Pendidikan berdasarkan hasil penelitian, bahwa diketahui sekolah hingga saat penelitian ini dilakukan, belum melakukan analisis SWOT. Sedangkan sekolah mempunyai rencana strategi sekolah, tetapi rencana strategi sekolah

tidak berdasarkan analisis mendalam terlebih dahulu. Pelaksanaan program merupakan aspek yang lebih dominan dibandingkan dengan komponen standar pengelolaan pendidikan lainnya.

Hasil ini juga didukung dengan penelitian (Aini et al., 2023) administrasi yang transparan memberikan kepercayaan kepada orang tua dan pemangku kepentingan sekolah. Mereka dapat menggabungkan kemajuan siswa, keuangan sekolah, dan kegiatan sekolah dengan lebih mudah. Administrasi yang baik membantu dalam memelihara akurasi data siswa, termasuk catatan kehadiran, nilai, dan informasi pribadi. Data yang akurat penting untuk pengambilan keputusan yang baik. Administrasi yang efisien memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah. Komunikasi yang baik mendukung pencapaian tujuan Pendidikan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan perlu adanya kolaborasi yang baik antara satuan Pendidikan dengan stakeholder seperti orang tua, lembaga non Pendidikan atau praktisi Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

3. Relevansi

Relevansi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan UU No. 17 tahun 2010 disimpulkan relevansi dengan kebutuhan dan sistem Pendidikan yang berlaku telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang terdapat dalam undang-undang sistem Pendidikan nasional. Namun dari beberapa aspek seperti

pemerataan pendanaan biaya Pendidikan dan sarana prasarana belum merata sehingga perlu ditingkatkan agar tercapai mutu Pendidikan nasional yang diharapkan. Hasil ini didukung dengan penelitian (Untari Ningsih, 2023) bahwa relevansi ada pada faktor manusia seringkali berperan penting dalam peralihan model atau sistem manajemen. Penerapan terbaik suatu standar memerlukan pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan sudut pandang pengguna dan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam menjelaskan manfaat dan fungsi sistem manajemen baru. Dengan mengedepankan faktor manusia pada saat melakukan pelatihan atau merumuskan kebijakan, resistensi pengguna dapat diminimalkan dan pada saat yang sama antusiasme pengguna dapat dicapai untuk mempercepat hasil positif dari adaptasi terhadap sistem dan tren terkini.

Hasil juga didukung dengan penelitian (Zaedun, 2019) bahwa terdapat relevansi atau keterkaitan antara sumber daya seperti teknologi pendidikan dengan mutu pendidikan, karena mutu pendidikan berkaitan dengan segala sesuatu yang bertujuan untuk mencapai pendidikan yang bermutu baik dari segi prestasi siswa, mutu pengajaran, dan kinerja sekolah yang dapat dicapai dengan baik melalui suatu teknologi pendidikan. Hal ini dikarenakan teknologi pendidikan melibatkan orang-orang yang mempunyai peranan penting dalam permasalahan pendidikan, kemudian diatur dengan menggunakan prosedur yang ada dan selanjutnya diselenggarakan tahapan untuk menganalisis dan mencari solusinya. Dari hasil pembahasan tersebut di atas maka dalam sistem manajemen perlu

dimulai dari: 1) Perencanaan adalah “suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisa, merumuskan, menimbang dan memutuskan, dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi internal (prinsip) yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan lain, baik di bidang itu sendiri maupun di bidang lain. tidak ada batasan waktu untuk suatu jenis kegiatan, dan suatu kegiatan tidak selalu harus mendahului dan didahului oleh kegiatan yang lain. 2) Pengawasan Penyelenggaraan kegiatan sekolah dibagi menjadi delapan bidang, yaitu kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, kebudayaan dan lingkungan hidup, peran hubungan masyarakat dan kemitraan, serta bidang lain yang berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu. 3) Evaluasi Supervisi dan evaluasi sekolah diwujudkan dalam lima aspek utama, yaitu penyusunan program supervisi, evaluasi diri sekolah, evaluasi dan pengembangan penerapan Kurikulum, evaluasi pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan akreditasi sekolah (Palahudin et al., 2020).

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa relevansi pengelolaan Pendidikan yang telah dilakukan berdasarkan UU No. 17 tahun 2010 bahwa relevansi Pendidikan yang ada berjalan dengan baik namun perlu ada pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan pendanaan pembiayaan Pendidikan dengan sentuhan teknologi Pendidikan sebagai sarana dalam pembelajaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan UU No. 17 tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Bahwa evaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan perlu ada peningkatan bagai kompetensi personil Pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada dalam setiap satuan Pendidikan sehingga tercapai mutu Pendidikan.
- b. Bahwa implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan perlu adanya kolaborasi yang baik antara satuan Pendidikan dengan stakeholder seperti orang tua, lembaga non Pendidikan atau praktisi Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Bahwa relevansi pengelolaan Pendidikan yang telah dilakukan berdasarkan UU No. 17 tahun 2010 bahwa relevansi Pendidikan yang ada berjalan dengan baik namun perlu ada pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan pendanaan pembiayaan Pendidikan dengan sentuhan teknologi Pendidikan sebagai sarana dalam pembelajaran.

Saran

Adapun yang menjadi rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tetap harus berlandaskan pada aturan pengelolaan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, D., Armanila, Amirah, S., Najwa, M., & Putri, P. (2023). Implementasi pengelolaan administrasi pendidikan di ra. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 1(6), 942–950.
- Akbar, M. F., & Mustangin, M. (2022). Transfer of knowledge: Bukti eksistensi adat bekudung betiung suku dayak ga'ai kampung tumbit dayak kabupaten berau. *SOSIOLOGI: Jurnal Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(1).
- Anwar, H. (2017). Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2).
- Daryanto. (2013). *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. Rineka Cipta.
- Didin, K., Imam, M., & Meita, S. (2013). *Manajemen Pendidikan : Konsep Dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Griffin. (2015). *Customer Loyalty*. Penerbit Erlangga.
- Hamid, D. (2019). *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi: Konsep Dasar, Teori, Strategi Dan Implementasi Dalam Pendidikan Globalisasi*. Ar-Ruzz Media.
- Harris, E. G., & Fleming, D. E. (2017). The productive service employee: Analisis Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan... (Lopis & Lao, 2024)
- personality, stress, satisfaction and performance. *Journal of Services Marketing*, 31(6), 499–511. <https://doi.org/10.1108/JSM-11-2015-0347>
- Hasyim F, M. (2010). *Bimbingan dan konseling Religius*. Ar-Ruzz Media.
- Imam, T. (2021). Pengelolaan Pendidikan Bermutu Di Madrasah. *Tarbawi*, 4(2), 1–23. <https://stai-binamadani.ejournal.id/Tarbawi>
- Jannah, M. (2020). *Partisipasi Orang Tua Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Anak*. Universitas Negeri Semarang.
- Kristianus, B. P., & Nehemia, N. (2023). Pendidikan Agama Kristen Sebagai Agen Restorasi Pendidikan Dalam Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Harmonis Di Sekolah–Sekolah. *Jurnal Filsafat Dan Teologi Katolik*, 6(2), 37–63. <https://doi.org/10.58919/juftek.v6i2.67>
- Lao, H. A. (2021). *Manajemen Pendidikan*. Lakeisha.
- Mestry, R. (2006). The functions of school governing bodies in managing school finances. *South African J Educ*, 26(1).
- Mulyadi, H. (2010). *Evaluasi Pendidikan*. UIN-Maliki Press.
- Mutia. (2019). Pelaksanaan Standar

- Pengelolaan Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. *Ilmu Pendidikan*, 3(2).
- Nazmudin, N. (2018). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>
- Nirwani, J., & Abubakar, A. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Spiritual Islami Dalam Kegiatan Pendidikan. *Jurnal Serambi Ilmu*, 20(1), 160. <https://doi.org/10.32672/si.v20i1.1000>
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurhayati, N., & Imron Rosadi, K. (2022). Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan, Dan Tenaga Pendidikan (Literatur Manajemen Pendidikan Islam). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 451–464. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.1047>
- Palahudin, P., Hadiana, M. E., & Basri, H. (2020). Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i1.9776>
- Putri, Z. D. (2020). Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan SMK Negeri 1 Bengkalis. *Jurnal Pendidikan Minda*, 1(2), 61–73. <http://www.ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/mindafkip/article/view/124>
- Rahayu, M. (2015). Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 8(1).
- Rahayuningsih, F. (2022). Internalisasi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 3(1).
- Sabar Budi, R. (2012). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 12(6).
- Simanjuntak, M. V., Maesaroh, M., & Santoso, S. (2014). Evaluasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Evaluasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Penyandang Cacat dan Kelainan). *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 160–167. <https://doi.org/10.14710/JPPMR.V3I3.5733>
-

Sodik, F. (2020). Pendidikan Toleransi dan Relevansinya dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia. *Tsamratul Fikri | Jurnal Studi Islam*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.36667/tf.v14i1.372>

Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabet.

Untari Ningsih, N. P. D. (2023). Relevansi Sistem Pengelolaan Arsip Digital Dengan Keamanan Data Di Dunia Pendidikan. *Lampuhyang*, 14(2), 1–10. <https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v14i2.355>

Utami, W. Y. D., Jamaris, M., & Meilanie, S. M. (2019). Evaluasi Program Pengelolaan Lembaga PAUD di Kabupaten Serang. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.259>

Zaedun, N. (2019). Relevansi Teknologi Pendidikan dan Mutu Pendidikan. *EVALUASI: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2)

▪ *How to cite this paper :*

Lopis, Y. S. & Lao, H.A.E. (2024). Analisis Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan PP.17 Tahun 2010 Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 8(2), 1003–1016.

